

Tema Penelitian: Al-Islam dan Kemuhammadiyah

**LAPORAN
PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL**



**SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH
PADA KONTESTASI POLITIK LOKAL**

Disusun oleh:

Ketua

Sadar, S.IP., M.I.P.

NIDN. 1107089401

Anggota


Muhammad Anzarach Pratama, S.AN., MPA

NIDN. 1117059403

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
MARET 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL

Judul Penelitian : SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH KALIMANTAN
TENGAH PADA KONTESTASI POLITIK LOKAL
Tema Penelitian : Al- Islam dan Kemuhammadiyah
Nama Ketua Peneliti : Sadar, S.IP., M.IP
NIDN : 1107089401
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Nama Anggota Peneliti : Muhammad Anzarach Pratama, S.AN., MPA
NIDN : 1117059403
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nomor HP : 082351927657
Alamat email : sadar@umpr.ac.id; muhammadanzarachp@umpr.ac.id
Mahasiswa : 2 Orang
Yang Terlibat :
Waktu Penelitian : 6 Bulan


Paraf Kaprodi Ilmu Administrasi Negara,  (Milka, S.Sos., M.AP) NIK. 18.0101.028	Laporan penelitian telah didata oleh prodi
--	--

Palangkaraya, 10 Maret 2023

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Administrasi Negara,



Peneliti,


(Sadar, S.IP., M.IP)
NIK. 20.0101.024

Menyetujui,
Kepala LP2M UM Palangkaraya


(Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd)
NIK. 12.0203.008

RINGKASAN

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan yang bergerak pada wilayah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan selalu menjadi lirikan bagi peserta pemilihan di setiap waktunya, sebab dianggap memiliki kekuatan politik yang menjanjikan, juga seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang konon merupakan representasi dari suara umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sikap politik Muhammadiyah di Kalimantan Tengah pada kontestasi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan alat analisis (tools analysis). Metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data. Untuk data primer digunakan observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dengan menelaahan dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada mobilisasi suara Muhammadiyah dalam kontestasi politik di Kalimantan Tengah, sementara penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap politik Muhammadiyah di Kalimantan Tengah tidak dikelktifkan, melainkan memberikan hak kepada semua warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihan masing-masing. Unsur pimpinan hanya menyampaikan tentang kriteria calon pemimpin tetapi untuk menjatuhkan pilihan kepada kontestan dikembalikan kepada individu masing-masing, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah sama sekali tidak pernah menekankan untuk mendukung salah satu calon. Hal itu karena pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah senantiasa mengedepankan prinsip politik moral sebagaimana seruan dari pimpinan pusat Muhammadiyah.

Kata Kunci: Sikap Politik Muhammadiyah, Kontestasi Politik Lokal

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Implikasi Hasil Penelitian	2
1.5. Peta Jalan (Roadmap) Penelitian.....	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka.....	4
2.2. Kerangka Teori.....	7
2.2.1. Sikap Politik	7
2.2.2. Civil Society.....	8
2.2.3. Perilaku Politik.....	13

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	15
3.2. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data	16
3.3. Pemilihan Informan Kunci	16
3.4. Analisis Data	16

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya.....	17
4.1. Jadwal Penelitian.....	17

DAFTAR PUSTAKA.....	19
----------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan yang bergerak pada wilayah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan selalu menjadi lirik bagi peserta pemilihan di setiap waktunya, sebab dianggap memiliki kekuatan politik yang menjanjikan, juga seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang konon merupakan representasi dari suara umat Islam.

Dinamika politik yang terjadi di negeri ini ikut menyertai perjalanan Muhammadiyah, namun yang sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun, serta konsisten bergerak pada ranah dakwah dan pembaharuan (baca: tajdid) yang sifatnya pencerahan. Namun Muhammadiyah bukan partai politik. Hal ini bisa dipandang dengan merujuk kembali khittah (baca: garis perjuangan Muhammadiyah) (Nashir, 2008). Kontribusi politik Muhammadiyah, sebagaimana posisinya sebagai civil society adalah pembinaan masyarakat dan berperan aktif dalam fungsi kritik dan masukan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Negara. Bagi Muhammadiyah, politik yang dikembangkannya adalah politik nilai yang tidak pernah jauh dari rakyat, sehingga ranah politik yang dikembangkannya adalah ranah politik yang selalu berpihak pada nilai, termasuk kaum mustadh'afin. (Nashir, 2006).

Jika menengok kembali ke sejarah, Muhammadiyah mempunyai pengalaman yang penting manakala masuk dalam keanggotaan istimewa Masyumi dan menjembatani berdirinya Parta Muslimin Indonesia (Parmusi). Dan yang masih tergolong hangat adalah Muhammadiyah terlibat aktif dalam kontestasi pemenangan salah satu dari calon presiden pada Tahun 2004. Beberapa fakta sejarah tersebut, memunculkan anggapan dari sebagian kalangan bahwa Muhammadiyah telah tergelincir dari khittah-nya. Yang sebagaimana diketahui bahwa Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama yang mencurahkan perhatiannya dalam bidang sosial, dan pendidikan.

Kontestasi politik local (Kalteng) menjadi sebuah arena kontekstasi yang rentan dengan berbagai dinamika politik. Hal itu dikarenakan pada setiap pencalonan atau kontestasi politik selalu diidentikan dengan politik identitas, bukan tanpa alasan,

karena kontestan yang ikut dalam kontestasi politik berasal dari kalangan umat beragama. Misalnya saja pada kontestasi pemilihan gubernur Kalteng pada tahun 2020 yang mana diantara dua Paslon memiliki latar belakang agama yang berbeda. Tentu saja, menjatuhkan pilihan berdasarkan beberapa pilihan, mulai dari integritas seorang calon sampai kepada kesamaan keyakinan (Agama) itu dibenarkan. Perhelatan dalam setiap kontestasi politik ditingkat lokal (Kalimantan Tengah) senantiasa memposisikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam yang sangat diperhitungkan. Perhelatan dalam kontestasi politik di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menarik adalah besarnya/pengaruh Muhammadiyah di Kalteng yang dianggap mampu mempengaruhi pencalonan para kontestan politik bahkan mempengaruhi keterpilihan kandidat tersebut. Besarnya pengaruh dari organisasi Muhammadiyah ini selanjutnya menjadikan “pihak luar” menyerap aspirasi Muhammadiyah untuk mendukung calon-calon yang telah disiapkan demi meraih suara dari warga Muhammadiyah. Hal itu dikarenakan persebaran anggota dan kepengurusan ditingkat daerah yang tergolong banyak. Dari empat belas kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, terdapat dua belas Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dua dari kabupaten yang belum terdapat PDM yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lamandau. Lantas bagaimana Muhammadiyah memandang dinamika politik tersebut? Inilah yang akan dibahas selanjutnya, terlepas dari independensi warga Muhammadiyah dalam memberikan dukungan perlu kita lihat jauh lebih dalam bagaimana Muhammadiyah memandang kontestasi politik khususnya di Kalimantan Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana sikap politik warga Muhammadiyah Pada Kontestasi Politik Lokal? Dan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang dinamika politik di Kalteng?

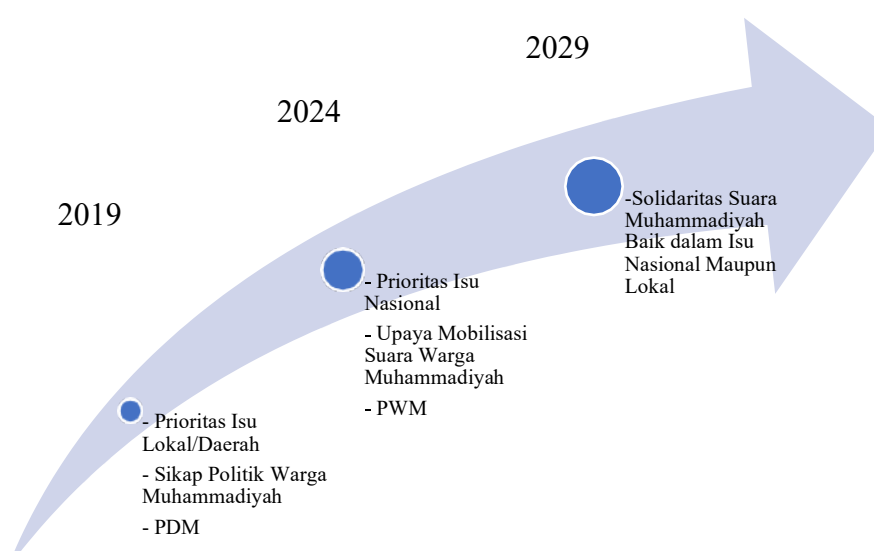
1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sikap politik warga Muhammadiyah Pada Kontestasi Politik Lokal dan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang dinamika politik di Kalteng

1.4 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat khususnya bagi warga Muhammadiyah tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilihan, baik pemilihan presiden dan DPR-RI maupun pemilihan ditingkat daerah seperti pemilihan gubernur, bupati/walikota, DPR provinsi dan kabupaten/kota. Penelitian ini juga menambah khazanah keilmuan terkait topik politik. Adapun implikasi langsung yaitu penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi pada para pemangku kebijakan untuk tetap memperhatikan segala hal untuk menjaga warwah demokrasi, dan hasil penelitian ini telah diterima pada pada “Jurnal Noken Ilmu-ilmu Sosial” Universitas Muhammadiyah Sorong, dan akan dipublikasikan pada Vol 8, No. 2 2022 (25 Juni 2023)

1.5 Peta Jalan (Roadmap) Penelitian



Gambar 1.1 Peta Jalan (Road Map)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Setiap orang dalam melakukan penelitian, kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan untuk menemukan sisi lain yang menarik atau hal lain dari penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka juga sebagai instrumen pembanding dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, kajian pustaka yang digunakan terkait dengan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan penelusuran literatur, berikut ini uraian hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

Ridho, Arah politik Muhammadiyah dalam pilpres 2019 (*analisis framing model robert n. Entman dalam media online republika.co.id, kumparan.com, dan tribunnews.com*). Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga media massa online yakni: Republika.co.id, Kumparan.com dan Tribunnews.com dalam pemberitaannya terhadap arah politik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 bersikap netral. Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan memilih istiqomah menjaga netralitas dalam Pilpres tersebut dan memberikan kebebasan bagi seluruh warga Muhammadiyah untuk memberikan hak suaranya pada perhelatan lima tahunan tersebut (Ridho, 2019a).

Harsono, Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015. Sikap Politik Organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA tahun 2015 tidak melakukan politik praktis serta mendukung salah satu calon secara formal serta organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai fasilitator yang bersifat informal dan sarana edukasi politik kepada warga Muhammadiyah tentang PEMILUKADA. Organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga (Harsono, 2018).

Sholikin, Dinamika Hubungan Muhammadiyah Dan Partai Politik Di Indonesia. Merujuk pada perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak mungkin menghindarkan diri dari arena politik, meskipun harus tetap istiqamah untuk tidak terjun dalam kancah politik

praktis. Data-data di atas menunjukkan bahwa kekuatan massa Muhammadiyah tidak dapat dipandang enteng. Kekuatan itu pernah membawa Masyumi muncul sebagai salah satu pemenang pemilu bersama PNI. Tetapi dalam perjalanannya, kekuatan politik Muhammadiyah sulit untuk disatukan hanya dalam satu partai politik sebagaimana Masyumi di tahun 50-an. Sehingga keluar jargon : Menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol. Artikulasi kepentingan politik Muhammadiyah sangat ditentukan gaya kepemimpinan tokoh sentralnya dalam merespon dinamika politik nasional yang terjadi pada masanya (Sholikin, 2018).

Ridho, Arah Politik Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden 2019: Sebuah Analisis Framing Media Online. Penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan yang bergerak pada wilayah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan selalu menjadi lirikan bagi peserta pemilihan presiden di setiap waktunya, sebab digadang-gadang memiliki kekuatan politik yang menjanjikan kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang konon merupakan representasi dari suara umat Islam (Ridho, 2019b).

Masduki dan Widyatama. Efektifitas Strategi Komunikasi Politik Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemenangan Pemilu DPD-RI Tahun 2014. Strategi Komunikasi politik yang dilakukan oleh Tim sukses maupun Afnan sendiri sudah efektif namun masih perlu masifitas dan penajaman. Hal ini terbukti gagasan Afnan yang diusung berupa pendidikan dan kesehatan yang sejak kampanye digelorkan tidak disinggung dan disebut sebagai simbol atau identitas yang mencirikan kekhasan program dan arahan gagasan yang akan diusung Afnan jika terpilih anggota DPD RI (Masduki & Widyatama, 2014).

Argenti, Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah. Diantara simpulan hasil penelitian ini yaitu, pasca reformasi ormas Islam Muhammadiyah memainkan peran cukup signifikan sebagai kekuatan civil society dalam pentas politik nasional, meskipun peran yang dimainkan Muhammadiyah itu sebatas politik moral yang tidak berkaitan dengan politik praktis, diantara peran Muhammadiyah adalah : Pertama, memberikan masukan dalam proses legislasi di DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) (Argenti, 2017).

Sholikin, Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah mendasarkan semua keputusannya pada khittah politik Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah (Sholikin, 2020).

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu yang ada diatas, dapat kita lihat bahwa sikap politik Muhammadiyah secara kelembagaan maupun secara individu anggota persyarikatan Muhammadiyah, masih berpegang pada prinsip politik moral. Dalam artian bahwa Muhammadiyah tidak memobilisasi anggotanya untuk memberikan dukungan kepada salah satu kontestan politik. Meskipun demikian terdapat satu perbedaan dari penelitian terdahulu diatas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masduki dan Widyatama. Dimana pada pencalonan anggota DPD-RI dicalonkan dari anggota persyarikatan dan ada upaya untuk mobilisasi suara dari kalangan anggota persyarikatan. Hal itu dilakukan karena suara yang diperoleh dari massa persyarikatan cenderung selalu mengalami penurunan. Selanjutnya posisi penelitian ini lebih memfokuskan kepada sikap politik warga Muhammadiyah khususnya di Kalimantan Tengah dalam setiap kontestasi politik. Bagaimana kecenderungan warga Muhammadiyah untuk menjatuhkan pilihannya pada salah satu calon. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain karena penelitian ini akan membahas tentang sikap dan kecenderungan warga Muhammadiyah dalam pergelatan politik ditingkat lokal khususnya di Kalteng.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Sikap Politik

Rasionalitas Sikap Pemilih, Organisasi Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan islam yang terus berkiprah di ranah dakwah Muhammadiyah dan tidak berjuang di dalam politik serta tidak memiliki hubungan dengan kekuatan politik.

Muhammadiyah membentengi dirinya dari Politik dengan Kittah (Garis Perjuangan) yang sudah mendarah daging didalam persyarikatan ini. Namun seiring dengan perkembangan jaman, setelah masa reformasi dimulai muncul kecenderungan untuk melibatkan Muhammadiyah dalam persentuhan dengan dunia politik. Pendirian partai politik dalam pemilihan umum berusaha menarik Muhammadiyah pada dukungan-dukungan politik tertentu dan pihak-pihak yang berkepentingan berusaha memperoleh dukungan politik Muhammadiyah tetapi sekali lagi Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. (Nashir, 2008).

Jurgen Habernas, dalam Piliang, lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan rasional adalah sebagai tindakan bertujuan. Pendapat bahwa rasionalitas politik akan berkaitan dengan pilihan-pilihan, tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka mencapai sebuah tujuan politik tertentu. Tindakan rasional dalam sikap politik seseorang dijelaskan lebih lanjut mempertimbangkan segala resiko yang akan diterima karena sudah bertentangan dengan main stream dan semangat kolektifitas (Piliang, 2004). Jegen Habernas, membedakan dua jenis rasionalitas lebih jauh dimana yang pertama, rasionalitas dari bawah yaitu rasionalisasi yang berkembang secara alamiah di kalangan masyarakat kelas bawah tanpa adanya komando atau koordinasai dari atas. Kedua, rasionalisasi dari atas yaitu rasionalisasi yang dikendalikan atau direkayasa oleh kelompok-kelompok elit dalam konteks politik massa (Piliang, 2004). Piliang selanjutnya membedakan rasionalisasi politik mejadi dua yaitu pertama, berdasarkan pada pikiran praktis bahwa tujuan pergantian pimpinan untuk mencapai sebuah kondisi pragmatis kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umum. Hal ini oleh piliang dinamakan sebagai substantince practical rationality. Kedua, untuk yang ini ia menyebut tujuan pergantian kepemimpinan adalah cara menciptakan perubahan sebagainya. Afan Gaffar menganggap bahwa pendekatan secara cultural masih relevan dalam memahami politik Indonesia secara kontemporer. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pola pembentukan dukungan dan mobilisasi politik pada masa pemilihan umum, akan sangat tepat dengan menggunakan pendekatan cultural ketimbang secara structural (Gaffar, 2006).

Menarik untuk memperbincangkan bagaimana sikap politik elite Islam, terutama pasca reformasi karena dari dulu hingga sekarang isu tentang bagaimana politik islam (islam substantif) dan islam politik (islam formalis) belum menemukan titik temu yang

bisa mendamaikan kedua kutub politik islam ini. Peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat bagaimana Muhammadiyah menentukan kebijakan politiknya dalam era pasca reformasi ditengah kecenderungan ekspresi umat Islam yang masih belum berdamai antara islam politik dan politik islam. Penulis mengambil sikap dalam penelitian ini bahwa semua pemikiran dan pergolakan antara dua kutub tersebut adalah merupakan hasil dan reproduksi pemikiran dari para elite-elite islam yang ada di Indonesia. Dalam mengkategorisasikan sikap politik elite, digunakanlah tesis tarik-menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu sikap inklusif dan sikap eksklusif. Sikap inklusif lebih mengedepankan substansi (bahkan lebih dari sekadar substansi) daripada simbol. Sedangkan sikap eksklusif lebih mengedepankan simbol daripada substansi. Dua kutub ekstrem inilah yang selalu mewarnai sikap politik di kalangan elite menengah Muslim di Indonesia.

2.2.2. Civil Society

Pemikiran tentang civil society sebenarnya bukanlah suatu konsep baru, tetapi sebagai sebuah gagasan yang awalnya lahir dari sejarah masyarakat barat, akar sejarah gagasan ini dapat ditelusuri kehadirannya sejak Aristoteles, meskipun Cicero-lah yang mulai menggunakan istilah societies civilis dalam filsafat politiknya. Pada awalnya pengertian masyarakat sipil dan negara dianggap sama dimana dipakai istilah-istilah seperti koinonia politike, societe civile, burgeliche serta gesellschaft, istilah-istilah itu untuk menyebutkan entitas masyarakat dan negara. Dalam perkembangannya kemudian, konsep civil society mendapat perubahan makna, mulai paruh kedua abad ke-16, sejalan dengan proses pembentukan formasi sosial dan perubahan struktur masyarakat barat akibat dari renaissance, istilah civil society baru dipahami sebagai entitas berbeda dengan negara. Konsep civil society menurut Syamsuddin Haris adalah sebuah idealisasi tentang suatu masyarakat yang mandiri secara politik, sosial dan ekonomi. Civil society suatu lingkungan interaksi sosial yang berada diluar pengaruh negara dan modal. Selain itu, menurutnya civil society merupakan suatu lingkungan dimana masyarakat menciptakan kreatifitas dalam mengatur kehidupannya, serta mampu memobilisasi diri tanpa keterlibatan dari negara. Sedangkan menurut Larry Diamond, bahwa fenomena people power yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 menunjukkan eksistensi kebangkitan masyarakat sipil (civil society) di kawasan Asia-Afrika yang merupakan imbas dari

adanya gelombang demokratisasi ketiga yang melanda dunia. Saat itu, menurut Larry Diamond, warga yang terlibat dalam menekan otoritarianisme bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari gerakan mahasiswa, gereja, asosiasi profesi, kelompok perempuan, serikat buruh, organisasi hak asasi manusia dan sejenisnya, kelompok-kelompok tersebut disebut sebagai asosiasi-asosiasi sosial yang mandiri (independent). Asosiasi yang melakukan perlawanan tersebut menurut Larry Diamond, merupakan wujud dari bentuk civil society. Jadi sangat jelas menurutnya proses demokratisasi yang terjadi di beberapa negara di dunia selalu dipelopori oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Wacana civil society bagi Diamond merupakan pintu utama untuk bisa memahami perubahan demokratis diseluruh dunia, jadi orang harus mempelajari konsep civil society untuk bisa menjelaskan dan memahami adanya proses transformasi sosial politik di sebuah negara dari otoriter-totaliter menjadi demokratis. Masyarakat sipil oleh Larry Diamond, dipahami sebagai bidang kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan diri, sebagian besar otonom atau mandiri dari entitas negara serta terikat tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Pengertian ini tentunya sangat berbeda dari “masyarakat” pada umumnya, karena civil society melibatkan warga untuk bertindak secara kolektif dalam ruang-ruang publik untuk menyatakan minat, semangat, bertukar informasi, mencapai tujuan bersama dan membuat segala tuntutan pada negara. Civil society merupakan suatu entitas perantara yang berdiri diantara pribadi (personal) dengan negara, dari pemilahan ini Larry Diamond, hendak membuat garis pemisah yang tegas antara entitas negara dengan masyarakatnya, masing-masing berdiri dengan tingkat otonomisasi yang berbeda, masyarakat sipil membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum yang dilembagakan untuk menjaga otonomi mereka dan kebebasan bertindak. Dengan demikian masyarakat sipil tidak hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi bisa mendukung otoritas negara yang sah, ketika otoritas itu didasarkan pada aturan hukum. Ketika negara itu sendiri tidak taat hukum dan menghina hak otonomi yang dimiliki individu dan masyarakat, sudah semestinya civil society melakukan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan yang menindas itu. Berikutnya Larry Diamond, menjelaskan beberapa fungsi civil society dalam bingkai pembangunan demokratisasi. (1) Memberikan dasar untuk membatasi kekuasaan negara, fungsi ini memiliki dua dimensi : untuk memantau dan mengendalikan kekuasaan, implikasi dua

dimensi ini tujuannya ialah untuk mendemokratiskan negara, fungsi civil society disini menjadi kekuatan penyeimbang dari dominasi negara yang sangat kuat, sehingga tidak mengarah pada bentuk pemerintahan yang refresif dan otoriter. Dalam fungsi ini masyarakat sipil berperan mengungkap segala bentuk pelanggaran dan mendelegitimasi rezim yang tidak demokratis, melalui mobilisasi kekuatan-kekuatan masyarakat sebagai gerakan oposisi diluar sistem pemerintahan, fungsi ini juga menundukan supremasi masyarakat sipil dalam memelopori, mengkonsolidasi dan mempertahankan proses demokratisasi di dalam sistem politik suatu negara. (2) Mendirikan asosiasi yang didalamnya menstimulasi adanya partisipasi politik, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan keterampilan warga negara yang demokratis. Asosiasi bersifat sukarela ini dapat dianggap sebagai institusi pendidikan gratis yang besar, dimana semua anggota komunitas pergi untuk belajar teori politik dasar, sehingga atribut-demokrasi seperti toleransi, moderasi, kesediaan berkompromi dan penghormatan atas perbedaan menjadi norma standar yang terinternalisasikan dalam tiap individu yang tergabung asosiasi atau organisasi sosial. (3) Civil Society bisa menggunakan saluran politik lain selain partai politik dalam melakukan artikulasi dan agregasi. (4) Masyarakat yang prural merupakan salah satu ciri dari civil society dimana didalamnya terdiri dari berbagai kepentingan. Organisasi, komunitas dan asosiasi sosial merupakan sarana untuk menampung segala kepentingan dari individu-individu yang menjadi anggotanya. (5) Mampu merekrut dan melatih para pemimpin politik yang baru, mereka belajar bagaimana terorganisir serta memotivasi manusia, masalah perdebatan dan membangun koalisi, ketika ruang-ruang pendidikan oleh partai politik menjadi sempit serta stagnan, fungsi civil society memainkan peran penting dalam revitalisasi demokrasi dan memperbaharui legitimasinya. (6) Banyak organisasi civil society membangun proses demokratisasi melalui lembaga-lembaga pemantau pemilu non partisan, lembaga-lembaga ini dibuat menurut Larry Diamond, untuk meningkatkan kepercayaan pemilih, menegaskan legitimasi hasil dan menghindari adanya kecurangan, fungsi kontrol masyarakat madani ini memainkan peranan sangat penting dalam proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, setelah sebelumnya berada dalam dominasi politik rezim otoriter. Menurut penulis fungsi keenam mempunyai peran yang sangat signifikan, karena kekuatan masyarakat sipil secara aktif turut terlibat dalam proses

demokratisasi membangun sistem politik yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dan (7) Peran masyarakat sipil dalam kebebasan untuk berserikat, dengan adanya kebebasan ini membuat masyarakat lebih otonom dalam mengatur kehidupannya termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sehingga menurut Larry Diamond bila fungsi ini berjalan relatif stabil bisa meringankan beban negara dalam peningkatan kualitas hidup warganya. Menurut Muhammad AS Hikam, civil society merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial terorganisir yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayan. Adapun, pengejawantahan masyarakat sipil adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok kepentingan. Pengertian civil society sendiri menurut Muhaamad AS Hikam, sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial di luar struktur negara yang terorganisir dengan bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang kuat ketika berhadapan dengan dominasi negara. Sebagai sebuah ruang politik, istilah civil society sendiri merupakan sebuah wilayah menjamin keberlangsungan perilaku serta tindakan refleksi mandiri yang tidak tersekap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik formal pemerintahan. Artinya, konsep civil society sangat menjunjung tinggi suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), sebuah tempat dimana segala transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Dari pengertian tentang civil society jelas kiranya bahwa masyarakat sipil haruslah memiliki sifat kemandirian serta kematangan politik, supaya masyarakat tidak mudah ditundukan oleh negara. Kemandirian disini maksudnya mandiri dari finansial, fasilitas dan kegiatan. Dengan kapasitas kemandirian yang tinggi tersebut, kekuatan civil society akan mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensionis negara. Selain kemandirian, keberadaan ruang publik yang bebas menjadi keniscayaan, karena disanalah tindakan politik sebenarnya dapat bermakna dan benar-benar terwujud. Pada ruang publik yang bebaslah secara normatif, setiap individu berada pada posisi setara serta mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka, termasuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Konsep civil society dalam perkembangan kontemporer menjadi kebutuhan yang mendesak bagi proses pembangunan demokratisasi, terlebih di

era desentralisasi politik saat ini, dimana masyarakat diberikan ruang partisipasi selebar-lebarnya untuk turut serta dalam proses pembangunan demokrasi. Demokratisasi di suatu negara akan berjalan dengan baik, apabila ruang partisipasi politik masyarakat melalui wadah civil society terbuka dengan lebar Menurut Afan Gaffar, yang paling banyak diharapkan memainkan peranan penting dalam mengisi ruang publik dalam civil society di Indonesia adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). LSM atau dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (Non Government Organization) merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat secara mandiri, organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah serta swasta, terutama dalam dukungan finansial dan sarana prasarana. Organisasi seperti ini dibentuk sebagai sebuah perwujudan komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai keperduliaan terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dibidang ekonomi, sosial dan politik. Kehadiran Organisasi non-Pemerintah (Non Government Organization) ditengah-tengah masyarakat merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan, hal ini terjadi karena bagaimanapun kapasitas dari pemerintah terbatas, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah, apalagi di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia.

2.2.3 Perilaku Politik

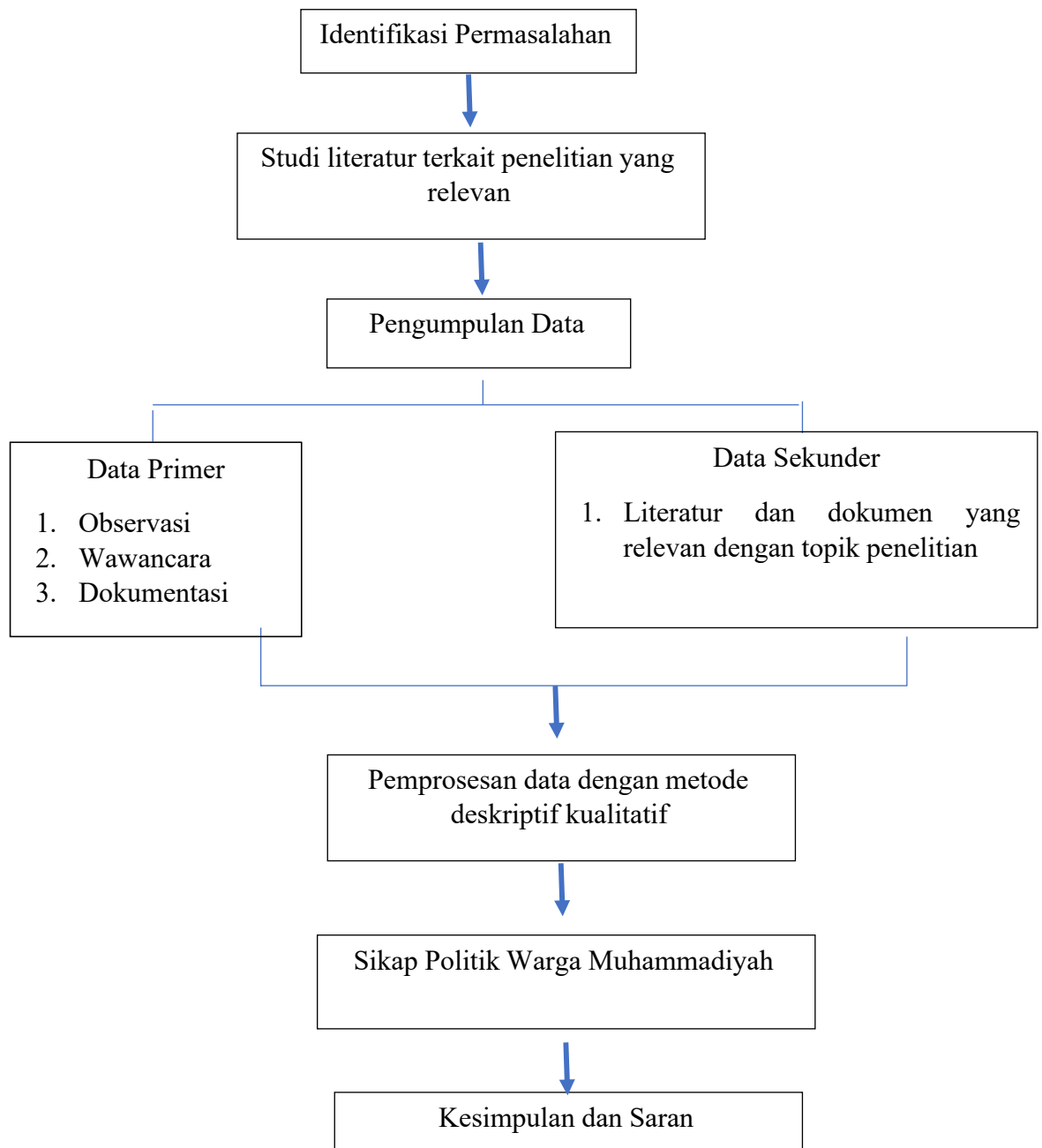
Perilaku Politik Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Ramlan Surbakti, bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya (Surbakti, 2010). Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Putra, 2003). Sedangkan sikap politik

adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Menurut Sobolim, Perilaku politik atau (Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah: a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) c. Ikut serta dalam pesta politik d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undangundang dasar danperundangan hukum yang berlaku (Sobolim, 2013).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pelaksanaan Penelitian

Bagan alir penelitian berisi metode dan tahapan yang jelas, luaran dan indikator setiap tahapan sejalan dengan Rencana Induk Riset Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

3.2. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan alat analisis (tools analysis). Metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data. Untuk data primer digunakan observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dengan menelaahan dan pemanfaatan dokumen.

3.3. Pemilihan Informan Kunci

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus wilayah Muhammadiyah Kalteng dan anggota Muhammadiyah yang lain yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan melalui beberapa pertimbangan seperti peran di Organisasi, serta kompetensi yang dimiliki informan.

3.4. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2012). Selanjutnya mengikuti alur analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Moral Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam Terbesar di Indonesia. Dinamika politik di tanah air senantiasa menjadi perhatian Muhammadiyah. Muhammadiyah senantiasa memosisikan diri Dalam politik praktis sebagai ormas yang ikut menjaga marwah pelaksanaan demokrasi. Salah satu sikap yang tonjolkan Muhammadiyah dalam pelaksanaan pesta demokrasi yaitu sikap yang dikenal dengan istilah Politik Moral Muhammadiyah. Politik moral Muhammadiyah diartikan sebagai bentuk partisipasi politik dengan tidak terlibat secara politik praktis secara langsung. Persentuhan Muhammadiyah dengan politik bukanlah sesuatu yang baru. Dalam Buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), tertulis dengan jelas bahwa warga Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dengan kehidupan politik (Argenti, 2017). Tetapi politik yang dimaknai Muhammadiyah secara organisatoris bukanlah politik praktis melainkan politik moral, karena sejak Muhammadiyah didirikan sudah memosisikan dirinya sebagai organisasi Gerakan dakwah non-politik. Dengan sebuah keyakinan bahwa Gerakan dalam dakwah tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik. Meskipun Muhammadiyah pernah bergerak secara politis, namun keterlibatannya hanya pinggiran dan tidak secara totalitas. Peran yang paling menonjol dari Muhammadiyah sampai sekarang justru sebagai representasi dari kekuatan *civil society*.

Kiprah politik Muhammadiyah secara nasional tentu dilihat dari peranan politik yang diimplementasikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Politik moral yang senantiasa di gembarkan Muhammadiyah dapat dilihat misalnya pada himbauan dari pimpinan pusat Muhammadiyah setiap kali akan digelar pesta demokrasi yang berskala nasional. Muhammadiyah sebagai organisasi Gerakan islam menjadi rujukan dan karena itulah Muhammadiyah harus memosisikan dirinya sebagai organisasi yang harus menjaga ke stabilan politik.

Berdasarkan ciri utama Muhammadiyah dalam politik moral itulah, sehingga dibeberapa pimpinan Muhammadiyah mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan yang paling bawah (ranting) senantiasa menekankan kepada setiap anggota

persyarikatan agar menampilkan sikap politik yang partisipatif, aktif tetapi tetap pada implementasi politik moral.

Diantara pimpinan wilayah yang senantiasa menekankan politik moral Muhammadiyah, ialah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang beraneka ragam suku budaya dan agama. Keberagaman di Kalimantan Tengah karena banyaknya penduduk dari daerah lain yang datang dan berdomisili di Kalimantan Tengah. Keberagaman itulah yang juga dapat mempengaruhi warna dinamika politik lokal di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai ormas islam senantiasa memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kestabilan politik di Kalimantan Tengah. Keberhasilan Muhammadiyah dalam menjaga stabilitas politik di Kalimantan Tengah, sebagai salah SATU representasi golongan islam. Muhammadiyah menganggap perlu adanya organisasi yang besar untuk bertindak dewasa agar tercipta suasana tenang dan damai terutama dalam masa-masa kontestasi politik. Kalimantan Tengah punya pengalaman di masa lalu tentang konflik yang berbau sara, sehingga tidak diinginkan hal tersebut terulang Kembali. Oleh karena itu, Muhammadiyah Kalimantan Tengah sebagai salah satu ormas islam yang sangat diperhitungkan keberadaannya senantiasa bertindak secara professional dengan penekanan pada pelaksanaan politik moral seperti yang senantiasa diamankan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.

Politik identitas di Kalimantan Tengah

Sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat ilmuwan sosial baru tertarik pada isu politik identitas, Ketika menghadapi masalah minoritas, gender, feminisme, ras, etnis dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan atau merasa teraniaya. Seiring perkembangannya kemudian cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural yang beragam (Maarif, 2012), Jadi yang mesti dipahami ialah, politik identitas bukan hanya merujuk pada isu-isu agama dan kepercayaan. Politik identitas adalah segala bentuk penggunaan identitas untuk menampakkan jati diri kelompok tersebut. Di Indonesia, Praktik politik identitas seringkali diartikan negative. Misalnya politik identitas atas nama agama, padahal praktik politik identitas dalam tatanan wajar boleh saja selama tidak mengakibatkan dinamika politik jadi kacau atau semacamnya. Politik identitas dalam

pemahaman Muhammadiyah, khususnya di Kalimantan Tengah adalah bentuk manifestasi kelompok-kelompok dalam menentukan pilihan politiknya, bisa memberikan dukungan politik terhadap seorang kandidat berdasarkan kesamaan agama dan keyakinan, bisa karena kesamaan suku dan sebagainya. Bersinggungan dengan hal ini, politik moral Muhammadiyah juga bagian dalam ranah pandangan tentang politik identitas, jika identitas dijadikan alat fatisme buta maka tentu bukan sebuah kewajiban melainkan harus dihindarkan dalam kegiatan politik ditanah air, baik yang nasional maupun ditingkat lokal.

Dinamika politik lokal di Kalimantan Tengah, diwarnai dengan ragamnya struktur sosial, baik keragaman dalam agama dan keyakinan, keragaman budaya, keragaman tradisi dan sebagainya, dan keragaman ini menampakkan identitas-identitas kelompok, dan bukan sebuah larangan jika dalam kegiatan politiknya masing-masing agama, kultur budaya dan sebagainya untuk berafiliasi kepada calon siapapun. Politik identitas yang dilarang ialah fanatisme terhadap kelompoknya sendiri dan mengintervensi kelompok lain dalam melakukan kegiatan politiknya.

Sikap politik warga Muhammadiyah

Buku pedoman hidup islami warga Muhammadiyah dengan jelas dan tandas menyebutkan bahwa anggota Muhammadiyah tidak boleh apatis terhadap kegiatan politik. Dalama artian bahwa Muhammadiyah harus berperan aktif dalam ranah kehidupan politik. Bukan hanya amanat untuk keaktifan warga Muhammadiyah dalam kehidupan politik, dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah terdapat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik sebagai bagian yang senantiasa melakukan kritik dan saran terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan. Hal itu menandakan bahwa persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang aktif dalam kehidupan politik tetapi bukan aktif sebagai bagian utama dalam politik praktis. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa persyarikatan Muhammadiyah senantiasa mengamanatkan kepada setiap anggotanya agar tidak apatis terhadap kehidupan politik, melainkan harus aktif terutama dalam ajang pemilihan eksekutif maupun legislatif.

Sikap politik warga Muhammadiyah (Kalimantan Tengah) dikembalikan kepada individu masing-masing. Pimpinan wilayah hanya menyampaikan secara umum kriteria-kriteria yang seharusnya menjadi pilihan bagi anggota persyarikatan,

yaitu calon pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan menurut agama Islam. Meski demikian, tidak ada paksaan jika ada anggota persyarikatan yang memilih tidak sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan. Pilihan politik seseorang seyogyanya harus dihargai, itu adalah hak dan amanat untuk diri masing-masing yang nanti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Perbedaan pilihan Pimpinan dan warga Muhammadiyah dalam kontestasi politik

Pilihan politik dalam Muhammadiyah bukan sebuah bentuk mandat atau instruksi. Perbedaan sikap politik antara pimpinan Muhammadiyah dan anggota Muhammadiyah sudah lumrah dalam tradisi persyarikatan Muhammadiyah. Tidak terkecuali dinamika politik di Kalimantan Tengah, yakni adanya perbedaan pilihan antara unsur pimpinan Muhammadiyah dengan para anggota Muhammadiyah dalam setiap kontestasi politik. Ditemukan bahwa pimpinan Muhammadiyah lebih selektif dalam memberikan pilihannya, pimpinan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah tentu saja memiliki perbedaan yang fundamen dalam pilihan politik. Hal itu terjadi karena para unsur pimpinan lebih matang dan dewasa dalam politik dibandingkan dengan anggota Muhammadiyah secara umum.

Perbedaan pilihan maupun sikap politik antara pimpinan dan warga Muhammadiyah di Kalimantan Tengah kemudian berpengaruh terhadap kecenderungan pilihan warga Muhammadiyah. Setiap warga Muhammadiyah memiliki kecenderungan pilihan masing-masing. Ada yang memberikan pilihan karena factor kedekatan emosional dengan kontestan politik, ada yang memberikan pilihan karena melihat track record seorang kontestan atau karena penawaran program melalui visi misi dan sebagainya.

Perbedaan yang terjadi sudah tentu menjadi kebiasaan, dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah secara khusus juga telah memahami, bahwa perbedaan sikap dan pilihan itu adalah hal yang wajar. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah cukup hanya memberikan tekanan bahwa setiap warga Muhammadiyah diharuskan menggunakan hak politiknya, warga Muhammadiyah tidak boleh fasif dalam ranah politik. Tetapi sekali lagi ditekankan bahwa Muhammadiyah dalam menggunakan hak politiknya jangan lupa untuk

senantiasa mengedepankan sikap politik moral, yakni menjadi warga yang taat dan tidak memperlihatkan fatisme buta dalam menyikapi perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argenti, G. (2017). Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah. *Jurnal Politikom Indonesia*, 2(2), 82–104.
- Haedar Nashir. (2006). No Title. In *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*.
- Haedar Nashir. (2008). *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*.
- Harsono, J. (2018). Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015. *Aristo*, 6(1), 81. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.780>
- Maarif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Democracy Project.
- Masduki, A., & Widyatama, R. (2014). Muhammadiyah Diy Dalam Pemenangan Pemilu Dpd-Ri. *EFEKTIFITAS STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH DIY DALAM PEMENANGAN PEMILU DPD-RI TAHUN 2014 Anang*, 1–18.
- Ridho, A. (2019a). Arah Politik Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden 2019: Sebuah Analisis Framing Media Online. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/kjc.11.01.2019>
- Ridho, A. (2019b). Arah Politik Muhammadiyah Dalam Pilpres 2019. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(1), 1–22.
- Sholikin, A. (2018). Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah antara Pusat dan Daerah. *Jurnal Polinter*, 3(2), 1–22. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/1080>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

BIODATA DOSEN PENGUSUL

A. Identitas Diri Ketua

Nama Lengkap	Sadar, S.IP., M.I.P.
Jenis Kelamin	L
Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
NIK	20.0101.024
NIDK	1107089401
Tempat dan Tanggal Lahir	Tubbi, 07 Agustus 1994
Email	sadar_bahtiar07@yahoo.com
HP	081236411337
Mata kuliah yang diampu	1. Kepemimpinan 2. Sistem Sosial dan Politik Indonesia 3. Manajemen Konflik

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Makassar	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	-
Program Studi	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Pemerintahan	-
Tahun Masuk-Lulus	2012-2017	2017-2019	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	PENDANAAN	
			SUMBER	JUMLAH (JUTA RP)
1	2017	Politik Penguasaan Air Bersih (<i>Studi Kasus Konflik Pengadaan PDAM di Kecamatan Tapango Kabupaten Polman</i>)	-	-
2	2019	Klan Masdar dalam Kontestasi Politik Lokal (Peran Modal Sosial – Politik Terhadap Kemenangan Ali Baal Masdar dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017)	-	-

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

NO	JUDUL ARTIKEL ILMIAH	NAMA JURNAL	VO/NO/ TAHUN
1	Clan Masdar in Lokal Political Contestation (Social-Political Capital Role in Political Marketing)	Journal of Governance and Public Policy	Vol. 6, No. 3 (2019)

2	Efektifitas Pemasaran Politik (Pull Marketing) terhadap kemenangan ABM-Eddy pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017	Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)	Vol. 8, No. 2 (2020)
---	---	--	----------------------

Semua data yang saya isikan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian penugasan penelitian.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan penelitian kompetitif dosen internal.

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Ketua tim pengusul

Sadar, S.IP., M.I.P
NIK. 20.0101.024

BIODATA DOSEN PENGUSUL

A. Identitas Diri Anggota

Nama Lengkap (dengan gelar)	Muhammad Anzarach Pratama
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
NIP/NIK	21.0101.014
NIDN	1117059403
Tempat dan Tanggal Lahir	Palangkaraya, 17 Mei 1994
Email	muhammadanzarachp@umpr.ac.id
Nomor Telepon/HP	085249307973
Mata kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. eGovernment 2. Organisasi dan Manajemen 3. Perilaku Organisasi 4. K e b i j a k a n K e p e n d u d u k a n

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Palangka Raya	Universitas Gadjah Mada	
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Publik	
Tahun Masuk – Lulus	2012-2016	2016-2020	
Judul Tugas Akhir	Warga Binaan Lapas Klas II A	Partisipasi Masyarakat di Dermaga Kereng Bangkirai terhadap Pembangunan Pariwisata	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Nurul Hikmah, S.Sos., M.AP	Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No/Tahun
1			
2			

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Temu Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

F. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir

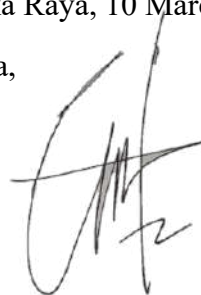
No	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Penugasan Penelitian

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan penelitian kompetitif dosen internal.

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Anggota,



Muhammad Anzarach Pratana, S.AN., MPA

